

DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS PILKADES DI DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Febrianti Hutagalung¹, Octa Vioni Pinem², Jekson Saragih³, Julia Ivana⁴

febriantihutagalung@gmail.com¹, octavioni2002@gmail.com²,

jeksonsumbayak28@gmail.com³, juliaivana@unimed.ac.id⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia adalah praktek politik uang. Istilah politik uang dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik uang yang dilakukan oleh elit politik dengan tujuan membeli suara masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Adapun hasil yang di dapat ialah, politik uang di desa laut dendang masih terus berjalan. Setiap pemilihan kepala desa selalu ada saja calon kepala desa yang melakukan politik uang, walaupun bukan berupa uang tunai biasanya para calon kepala desa memberikan berupa bantuan kepada para masyarakat agar mendapatkan simpati masyarakat saat pemilihan kepala desa. Dari beberapa narasumber ada narasumber yang tidak menerima hal hal tersebut karena dianggap sebagai kecurangan dalam pemilihan kepala desa, tetapi banyak juga yang menerimanya dengan alasan mereka membutuhkan sembako dan uang tersebut untuk melanjutkan kehidupan mereka. Politik uang menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi yang seharusnya merupakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk mewakili kepentingan publik.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu.

ABSTRACT

One of the main enemies in every democratic party, both national and local in Indonesia, is the practice of money politics. The term money politics is meant as the practice of buying voters' votes by election participants, as well as by success teams, whether official or not, usually before voting takes place. This research aims to analyze how money politics is practiced by political elites with the aim of buying people's votes. The research method used is a qualitative method with primary and secondary data types. The results obtained are that money politics in Laut Dendang Village is still ongoing. Every time there is a village head election, there are always village head candidates who engage in money politics, even though it is not in the form of cash, usually the village head candidates provide assistance to the community in order to gain the community's sympathy during the village head election. From several sources, there were sources who did not accept things. This was because it was considered fraud in the village head election, but many also accepted it on the grounds that they needed the basic necessities and money to continue their lives. Money politics poses a serious threat to the democratic process which should be a mechanism that allows the people to elect the best leaders to represent the public interests.

Keyword: Money Politics, Elections.

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan proses demokrasinya yang dinamis, seringkali diwarnai dengan politik patronase dan politik uang pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Fenomena ini telah menjadi bagian integral dari realitas politik negeri ini. Politik patronase, yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau posisi untuk mempengaruhi dukungan politik, dan praktik politik yang melibatkan uang yang secara finansial menguntungkan kelompok kepentingan, mempunyai dampak yang signifikan

terhadap proses demokrasi.

Salah satu aspek yang mempersulit Pilkada adalah politik uang, dimana pejabat atau calon pemimpin suatu daerah menggunakan kekuasaan atau sumber daya negara untuk mendapatkan dukungan. Hal ini dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk memanipulasi opini publik, penyalahgunaan dana publik untuk tujuan politik, dan janji dukungan yang tidak realistis. Tindakan-tindakan ini mengancam integritas proses demokrasi dan melemahkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam persaingan politik. Praktik politik uang juga menjadi persoalan serius dalam Pilkada. Praktik ini melibatkan pemberian uang, barang, atau imbalan lain kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan atau suara. Fenomena ini tidak hanya merusak hakikat demokrasi yang sehat, namun juga mereduksi nilai pemilu berdasarkan isi program dan visi misi calon utama presiden daerah.

Penting untuk mengkaji fenomena praktik politik uang yang meluas di Indonesia dalam konteks pembangunan demokrasi yang sehat. Hal ini penting tidak hanya untuk memahami dinamika politik lokal, namun juga untuk kualitas demokrasi secara keseluruhan. Pertama, kajian mendalam mengenai patronase dan praktik politik uang memungkinkan kita mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan yang menghambat proses demokrasi yang adil dan adil. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui dampak praktik-praktik tersebut terhadap proses politik, termasuk partisipasi politik dan integritas pemilu. Kedua, mengkaji politik patronase dan politik uang menawarkan peluang untuk mengembangkan solusi efektif untuk memerangi praktik-praktik yang melemahkan demokrasi. Analisis yang cermat dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan atau perubahan sistemik yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem politik. Ketiga, wawasan dari penelitian mengenai politik patronase dan praktik kebijakan moneter meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman terhadap proses demokrasi.

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang mengganggu integritas proses demokrasi. Fenomena ini melibatkan pembagian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan atau suaranya. Praktik ini tidak hanya melemahkan esensi pemilu yang berdasarkan pada isi visi, misi dan program kandidat, namun juga mempunyai konsekuensi serius terhadap keadilan persaingan politik. Selain itu, praktik politik uang menciptakan saling ketergantungan antara pemilih dan calon pemimpin daerah serta mengubah dinamika proses demokrasi ke arah transaksi keuangan dibandingkan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan politik dan kualitas kepemimpinan.

Pengalaman Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sangat penting untuk mengkaji dampak dan realitas yang dihadapi mahasiswa dalam konteks proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (PILKADA) kerap menjadi ajang berbagai praktik politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat, termasuk klientelisme dan politik moneter. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan dan pilar masa depan negara. memainkan peran penting dalam mengamati, memahami dan merespons praktik politik saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, adalah model penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap,

keyakinan dan persepsi. Penelitian dilakukan di Desa Laut Dendang Kec.Percut Sei Tuan, dimana penelitian tersebut dilakukan dengan observasi langsung kepada Masyarakat.

Jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan Sekunder, yang dimana data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan melalui wawancara terbuka/langsung (Danang Sunyonto, 2013). Sedangkan data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2009). Sementara menurut Amirin (1995) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia adalah praktek politik uang. Istilah politik uang dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka. Money politics, atau yang sering disebut politik uang, adalah praktik pemberian atau janji pemberian imbalan berupa uang, barang, atau jasa kepada pemilih agar mereka memilih kandidat tertentu atau tidak menggunakan hak pilih mereka. Praktik ini dianggap sebagai bentuk kecurangan pemilu yang dapat merusak demokrasi.

Peran serta atau partisipasi mahasiswa dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.

Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi mahasiswa untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mengenai dampak politik uang dalam pemilihan PILKADES di Desa Laut Dendang bahwa politik uang di desa laut dendang masih terus berjalan. Pada pemilihan terakhir ini calon kepala desa juga memberikan kecurangan kepada masyarakat dengan membagikan uang dan sembako kepada masyarakat demi menarik perhatian masyarakat desa Laut Dendang.

Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada peneliti kepada masyarakat laut dendang terhadap politik uang yang pernah ada pada desa tersebut bahwa setiap pemilihan kepala desa selalu ada saja calon kepala desa yang melakukan politik uang, walaupun bukan berupa uang tunai biasanya para calon kepala desa memberikan

berupa bantuan kepada para masyarakat agar mendapatkan simpati masyarakat saat pemilihan kepala desa. Dari beberapa narasumber ada narasumber yang tidak menerima hal tersebut karena dianggap sebagai kecurangan dalam pemilihan kepala desa, tetapi banyak juga yang menerimanya dengan alasan mereka membutuhkan sembako dan uang tersebut untuk melanjutkan kehidupan mereka. Para masyarakat beranggapan bahwa kecurangan yang dilakukan para calon kepala desa menguntungkan kepada mereka karena mendapatkan sembako dan mendapatkan uang, mereka mengesampingkan akan bagaimana kepribadian seorang calon kepala desa tersebut untuk memimpin desa mereka.

Adapun dampak Politik uang terhadap demokrasi lokal menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah Politik uang menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi yang seharusnya merupakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk mewakili kepentingan publik. Praktik politik uang seringkali membuat calon-calon dengan modal finansial besar memiliki keunggulan yang tidak adil dalam perlombaan politik. Hal ini mengakibatkan terpinggirkannya calon-calon yang sejatinya memiliki visi, misi, dan program yang lebih baik untuk kemajuan daerah. Ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat akan beranggapan bahwa seluruh jajaran pemerintah melakukan kecurangan demi sebuah kekuasaan, dan kekuasaan yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang berasal dari masyarakat sendiri.

KESIMPULAN

Money politics, atau yang sering disebut politik uang, adalah praktik pemberian atau janji pemberian imbalan berupa uang, barang, atau jasa kepada pemilih agar mereka memilih kandidat tertentu atau tidak menggunakan hak pilih mereka. Praktik ini dianggap sebagai bentuk kecurangan pemilu yang dapat merusak demokrasi. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Politik uang menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi yang seharusnya merupakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk mewakili kepentingan publik. Praktik politik uang seringkali membuat calon-calon dengan modal finansial besar memiliki keunggulan yang tidak adil dalam perlombaan politik. Hal ini mengakibatkan terpinggirkannya calon-calon yang sejatinya memiliki visi, misi, dan program yang lebih baik untuk kemajuan daerah. Ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat akan beranggapan bahwa seluruh jajaran pemerintah melakukan kecurangan demi sebuah kekuasaan, dan kekuasaan yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang berasal dari masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019," J. Ilm. Ilmu Adm. Negara, vol. 8, pp. 1–14, 2019,
- I. Setiawan, Ibrahim, and Ranto, "PATRONASE DAN KLIENTALISME POLITIK (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019)," BULLET J. Multidisiplin Ilmu, vol. 1, no. 6, pp. 1255–1262, 2022.
- LESTARI, S. A. (2023). PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 (STUDI KASUS DESA PESANTREN KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS) (Doctoral dissertation, IPDN).
- K. P. Umum and P. S. Utara, Mengapa Harus Memilih ?Partisipasi Masyarakat Sulut Saat Pilkada di Tengah Pandemi.

- M. Mahsun, "Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan," JPW (Jurnal Polit. Walisongo), vol. 2, no. 1, pp. 13–26, 2020, doi: 10.21580/jpw.2020.2.1.1996.
- O. G. Madung, "Korupsi, Patronase, Dan Demokrasi," J. Ledalero, vol. 15, no. 1, p. 11, 2016, doi: 10.31385/jl.v15i1.26.11-23.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464-480.